

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

1. Profil Provinsi Jawa Timur

- a. Luas dan Batas Administrasi Provinsi Jawa Timur

Gambar 4.1
Peta Provinsi Jawa Timur



Sumber : <https://jatimprov.go.id>

Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 48.039,14 km² memiliki batas-batas sebagai berikut sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudra Hindia dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Pulau Madura. Luas wilayah Jawa Timur

mencakup 90% dari seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur, sedangkan luas Pulau Madura hanya sekitar 10% saja. Secara administratif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.722 Desa.

Provinsi Jawa Timur juga terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Barkowil), yaitu sebagai berikut Pertama, Barkowil I meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar dan Kab. Nganjuk. Kedua, Barkowil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Jombang dan Kab. Lamongan. Ketiga, Barkowil III Malang meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi. Keempat, Barkowil IV Pamekasan meliputi Kota Surabaya, Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep.¹

Dalam konstelasi wilayah yang lebih besar, Provinsi Jawa Timur terletak di wilayah Timur pulau Jawa. Batas wilayah Provinsi Jawa Timur di sebelah utara, Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut

¹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Media Jatim Menuju E-Government Tentang Profil : Sekilas Jawa Timur" dalam <https://jatimprov.go.id>, diakses 18 Desember 2020

Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan perairan terbuka, Samudera Indonesia, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah.²

b. Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa (selain DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta). Provinsi Jawa Timur secara astronomis terletak antara $111^{\circ},0'$ – $114^{\circ},4'$ Bujur Timur dan $7^{\circ},12'$ – $8^{\circ},48'$ Lintang Selatan. Provinsi Jawa Timur dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan Utara-Selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau. Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah Timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

² Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan” dalam <https://jatimprov.go.id>, diakses 18 Desember 2020

Kondisi kawasan pada Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi empat aspek antara lain kondisi kawasan tertinggal, kondisi kawasan pesisir, kondisi kawasan pegunungan dan kondisi kawasan kepulauan.³

2. Visi dan Misi Provinsi Jawa Timur

Visi dan misi adalah salah satu hal yang mendasar dalam suatu organisasi dan wajib untuk dimiliki guna dijadikan pedoman keberhasilan organisasi maupun pemerintahan. Berikut ini visi dan misi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :⁴

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan gotong royong.

b. Misi

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintah yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewarganegaraan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.

³ *Ibid.*,

⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, “Media Jatim Menuju E-Government Tentang Profil : Visi dan Misi” dalam <https://jatimprov.go.id>, diakses 18 Desember 2020

4. Melaksanakan suatu proses pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

3. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal adalah suatu kegiatan berupa menanamkan modal untuk menjalankan usaha yang dilakukan di wilayah Indonesia oleh penanam modal atau investor dalam negeri. Kegiatan penanaman modal diharapkan menjadi motor penggerak dan mempercepat pembangunan ekonomi Nasional serta mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri.⁵ Oleh karena itu, kehadiran Penanaman Modal Dalam Negeri memiliki peranan yang sangat penting sebagai alternatif sumber pendanaan dalam negeri yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri, meningkatkan produksi dan mampu menciptakan lapangan kerja.

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah penggunaan daripada kekayaan seperti yang telah disebutkan di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menjalankan usaha menurut atau

⁵ Ferry Susanto Limbong, *Impilikasi Hukum Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Investasi*, Jurnal Warta Universitas Dharmawangsa Edisi : 57, ISSN : 1829-7463, 2018, hal. 3

berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang telah ditentukan.⁶ Untuk membedakan modal baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh Negara asing, perseorangan Warga Negara Asing, badan usaha atau badan hukum asing serta badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Berikut perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 :

Tabel 4.1
Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012-2019

Tahun	Penanaman Modal Dalam Negeri (Persentase)				Jumlah
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
2012	51,25	52,04	52,74	53,34	209,37 %
2013	52,61	51,96	51,40	50,89	206,86 %
2014	55,03	59,39	63,97	68,80	247,19 %
2015	64,37	60,15	56,11	52,26	232,86 %
2016	55,24	58,11	60,87	63,55	237,77 %
2017	64,51	65,52	66,58	67,69	264,30 %
2018	67,17	66,56	65,88	65,09	264,70 %
2019	68,59	71,85	74,90	77,77	293,11 %

Sumber : <https://dpmpstsp.jatimprov.go.id> data diolah

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, (Jakarta: JDIH Sekretaris Kabinet, 1967), hal. 2

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2019 terus mengalami pertumbuhan yang positif. Kenaikan tertinggi Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 293,11 % dan Penanaman Modal Dalam Negeri terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 206,86 %.

Pada tahun 2012 Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami kenaikan sebesar 19% daripada tahun 2011, hal ini didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri berfasilitas maupun nonfasilitas serta iklim investasi yang kondusif dilakukan melalui kapasitas kelembagaan, promosi investasi, pelayanan perijinan dan pelaksanaan kinerja investasi pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten/Kota.⁷ Pada tahun 2013 dan 2014 Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami kenaikan berdasarkan lima sektor usaha terbesar adalah listrik, gas dan air dengan capaian Rp 25,8 Triliun, pertambangan Rp 18,8 Triliun, industri makanan Rp 15,1 Triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 13,3 Triliun serta industri kimia dan farmasi Rp 8,9 Triliun serta didukung setelah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengumumkan 5 lokasi favorit investasi di Indonesia selama kurun waktu Januari-Desember 2014 yang menunjukkan Jawa Timur menduduki posisi pertama lokasi tujuan investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.⁸ Pada tahun 2015

⁷ Agnes Swetta Br. Pandia, “Nilai Investasi di Jatim Naik 19 Persen” dalam <https://kompasiana.com.cdn.ampproject.org> diakses 29 Desember 2020

⁸ Kominfo Jatim, Selama 2014, “Jatim Paling Diminati Investor dalam Negeri” dalam <https://www.kominfo.jatim.prov.go.id> diakses 29 Desember 2020

Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami penurunan sebesar 14,33% dari capaian tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan oleh pelemahan ekonomi dan penurunan daya saing. Pada tahun 2016 dan 2017 Penanaman Modal Dalam Negeri Jawa Timur mengalami kenaikan setelah menempati posisi pertama yang menyumbang 17% dari total penyerapan tenaga kerja nasional didukung oleh sektor perdagangan dan bidang usaha pertanian, perumahan, kawasan industri dan perkantoran serta industri makanan. Pada tahun 2018 hingga 2019 Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami peningkatan yang cukup pesat. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang stabil, tingkat inflasi rendah dan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran salah satunya berupa hadirnya dana repatriasi yang berasal dari program anesti pajak (*tax amnesty*). Kenaikan ini juga didominasi oleh sektor konstruksi sebesar Rp 9,88 Triliun, industri makanan Rp 9,5 Triliun dan listrik, gas dan air sebesar Rp 9,13 Triliun.⁹

Berdasarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa semakin besar atau semakin banyak nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri artinya kebijakan penguatan Penanaman Modal Dalam Negeri akan memberikan dampak positif untuk mendorong perekonomian secara nyata terhadap perekonomian seperti dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran, sehingga masyarakat memiliki

⁹ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Data Dinamis Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019*, (Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2015), hal. 124-133

pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰ Dari data rilis yang didapat, pada kategori Penanaman Modal Dalam Negeri Kabupaten Pasuruan menduduki peringkat pertama dengan realisasi sebesar Rp 2,6 Triliun, disusul Kabupaten Mojokerto Rp 1,6 Triliun, Kabupaten Jombang Rp 1,6 Triliun, Kabupaten Gresik Rp 1,5 Triliun dan Kabupaten Tuban Rp 1,3 Triliun.

4. Perkembangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019

Penanaman Modal Asing adalah suatu kegiatan menanam modal yang di dalamnya terdapat unsur asing (*foreign element*), dimana unsur tersebut dapat ditentukan oleh jenis kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan lainnya. Penanaman Modal Asing yang dimaksudkan hanya investasi yang meliputi Penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dengan secara langsung pemilik modal menanggung resiko atas penanaman modal asing tersebut.¹¹

Penanaman Modal Asing memainkan peran penting dalam menggerakkan kehidupan ekonomi bangsa, karena suntikan dan pembentukan modal asing mampu memperbesar kapasitas produksi, mengembangkan inovasi teknologi, menaikkan pendapatan nasional maupun menciptakan lapangan kerja baru, dalam hal ini akan semakin

¹⁰ Luh Putu Putri Awandari dan I Gst Bgs Indrajaya, *Pengaruh Infrastruktur, Investasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kesempatan Kerja*, E-Jurnal EP Unud, Vol. 5, No. 12, 2016, hal. 1437

¹¹ Abdul Malik dan Denny Kurnia, *Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*, Jurnal Akuntansi, Vol. 3, No. 2, 2017, hal. 37

memperluas kesempatan kerja.¹² Oleh karena itu, Penanaman Modal Asing memiliki dampak yang positif terhadap perekonomian Nasional tak terkecuali Negara-negara berkembang. Berikut perkembangan Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 :

Tabel 4.2
Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012-2019

Tahun	Penanaman Modal Asing (Persentase)				Jumlah
	TW I	TW II	TW III	TW IV	
2012	48,74	47,95	47,25	46,65	190,59 %
2013	47,38	48,03	48,59	48,90	192,90 %
2014	44,96	40,60	36,02	31,19	152,77 %
2015	35,62	39,84	43,88	47,73	167,07 %
2016	44,75	41,88	39,12	36,44	162,19 %
2017	35,48	34,47	33,41	32,30	135,66 %
2018	32,82	33,43	34,11	34,90	135,26 %
2019	35,40	35,14	32,09	32,95	135,58 %

Sumber : <https://dpmpdsp.jatimprov.go.id> data diolah

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2019 mengalami naik turun atau fluktuatif. Kenaikan tertinggi Penanaman Modal Asing di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 192,90 % dan Penanaman Modal Asing terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu 135,26 %.

¹² Rini Sulistiawati, *Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Indonesia ...*, hal. 35

Pada tahun 2012 dan 2013 perkembangan Penanaman Modal Asing mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini didukung pada sektor-sektor besar meliputi listrik, gas, dan air sebesar Rp 21,01 Triliun, industri makanan Rp 12,53 Triliun, Industri Kimia dan Farmasi Rp 9,35 Triliun serta minat Negara asal Penanam Modal Asing di Jawa Timur Terbesar adalah Singapura dengan investasi Rp 3,12 Triliun, Jepang dengan investasi Rp 2,81 Triliun dan Yordania dengan investasi sebesar Rp 1,55 Triliun. Pada tahun 2014 Penanaman Modal Asing mengalami penurunan, hal ini tentunya meleset dari target Pemerintah Jawa Timur tahun lalu dengan capaian antara Rp 155 Triliun – Rp 160 Triliun, penyebabnya adalah tingginya biaya pekerja di Jawa Timur dan sumber pertumbuhan ekonomi dari pembentukan modal tetap bruto yang melemah. Pada tahun 2015 Penanaman Modal Asing mengalami kenaikan kembali dengan didukung oleh sektor-sektor besar meliputi transportasi, gudang dan komunikasi sebesar Rp 4,68 Juta, industri makanan Rp 2,64 Juta dan industri mineral non logam Rp 0,59 Juta serta minat Negara asal Penanam Modal Asing di Jawa Timur terbesar adalah Malaysia dengan investasi Rp 4,57 Juta, Inggris dengan investasi Rp 2,95 Juta dan Singapura dengan investasi 1,09 Juta. Dan pada tahun 2016 sampai 2018 Penanaman Modal Asing terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan beberapa indikasi diantaranya rendahnya penyerapan anggaran program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, terdapat hambatan dari dalam negeri berupa kebijakan *Online*

Single Submission (OSS) dan belum maksimalnya implementasi aturan kemudahan investasi.¹³

Berdasarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, terjadinya peningkatan Penanaman Modal Asing memberikan dampak positif diantaranya dapat membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua Negara serta mengindikasikan optimisme penanaman modal di Provinsi Jawa Timur yang juga menjawab kekhawatiran *capital outflow* sebagai dampak *Fed Fund Rate* (FFR).

5. Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2019

Kemiskinan sudah menjadi masalah global, dimana setiap Negara memiliki anggota masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi suatu standart hidup tertentu. Kemiskinan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan yang banyak digunakan di Negara berkembang adalah kemiskinan absolut yang membandingkan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga dengan garis kemiskinan. Suatu masyarakat dikatakan menjadi miskin dikarenakan perekonomian secara umum memburuk sehingga tingkat pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan

¹³ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, "Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur" dalam *Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur*, Edisi Juni 2014, hal. 38-42

minimumnya, dan sebaliknya masyarakat dikatakan tergolong tidak miskin adalah apabila kondisi perekonomian dengan dicirikan masyarakat memperoleh pekerjaan sehingga dapat memberikan penghidupan yang lebih baik.

Kemiskinan merupakan keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, komunitas atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar menawar (*bargaining*) dalam pergaulan dunia, hilangnya generasi serta suramnya masa depan bangsa dan Negara. Selain itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).¹⁴ Kebutuhan dasar makanan yang dimaksud adalah pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal/kapita/hari (diwakili paket komoditi kebutuhan dasar makanan sebanyak 52 jenis komoditi). Sedangkan kebutuhan dasar non makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (diwakili 51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan). Ketentuan yang mejadi dasar kecukupan 2.100 kkal/kapita/hari ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin dan perkiraan tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis penduduk, ukuran ini sering disebut

¹⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Timur, *Data Dinamis Perekonomian Jawa Timur Desember 2019*, (Surabaya: Biro Administrasi Perekonomian Jatim, 2019), hal. 52

dengan garis kemiskinan. Berikut perkembangan tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019 :

Tabel 4.3
Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012-2019

Tahun	Tingkat Kemiskinan (Persentase %)				Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)			
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV
2012	13,40	13,24	13,08	12,81	5.070,98	5.015,99	4.961,00	4.866,13
2013	12,55	12,64	12,73	12,57	4.771,26	4.818,54	4.865,82	4.826,30
2014	12,42	12,35	12,28	12,31	4.786,79	4.767,60	4.748,42	4.768,77
2015	12,34	12,31	12,28	12,16	4.789,12	4.782,54	4.775,97	4.739,63
2016	12,05	11,95	11,85	11,81	4.703,30	4.670,91	4.638,53	4.627,77
2017	11,77	11,48	11,20	11,09	4.617,01	4.511,14	4.405,27	4.368,93
2018	10,98	10,91	10,85	10,61	4.332,59	4.312,37	4.292,15	4.202,20
2019	10,37	10,28	10,20	10,64	4.112,25	4.084,12	4.056,00	4.237,55

Sumber : <https://www.jatim.bps.go.id> data diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur periode tahun 2012-2019 mengalami penurunan secara bertahap di setiap tahunnya. Penurunan terendah tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 10,61% dengan jumlah penduduk 4.202,20 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2019 terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,03% menjadi 10,64% dengan jumlah penduduk bertambah menjadi 4.237,55 ribu jiwa.

Kemiskinan di Jawa Timur secara umum mengalami penurunan terhitung mulai periode tahun 2012 sampai tahun 2019, kecuali pada periode Triwulan III tahun 2013, Triwulan I tahun 2015 dan Triwulan IV tahun 2019. Peningkatan angka kemiskinan pada Triwulan III tahun 2013 Triwulan I tahun 2015 dan Triwulan IV tahun 2019 dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak serta munculnya pandemi Covid-19 yang terjadi dalam kurun beberapa bulan terakhir yang berimbas pada perekonomian nasional bahkan Negara. Selama periode Triwulan III tahun 2018 sampai Triwulan I tahun 2019, persentase penduduk miskin Jawa Timur mengalami penurunan sebesar 0,48%, yaitu dari 10,85% pada Triwulan III tahun 2018 menjadi 10,37% pada Triwulan I tahun 2019. Penurunan selama satu semester tersebut ditunjukkan dengan turunnya jumlah penduduk miskin sebesar 179,9 ribu jiwa yang semula berjumlah 4.292,15 ribu jiwa pada Triwulan III tahun 2018 menjadi 4.112,25 ribu jiwa pada Triwulan I tahun 2019.

B. Pengujian Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah bagian dari uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data dalam penelitian telah memiliki distribusi secara normal atau tidak. Sebuah data akan terlihat

baik digunakan untuk menganalisis dalam menjawab dan menjelaskan fenomena apabila data penelitian memiliki distribusi secara normal atau memenuhi normalitas data.¹⁵ Hasil uji normalitas dapat diketahui melalui tabel *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah apabila nilai signifikansi $> 0,05$ artinya data tersebut berdistribusi normal dan sebaliknya apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Berikut ini hasil uji normalitas dari penelitian ini adalah :

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penanaman Modal Dalam Negeri	Penanaman Modal Asing	Penurunan Tingkat Kemiskinan
N		32	32	32
Normal Parameters ^a	Mean	61.1309	39.7506	11.8597
	Std. Deviation	7.58702	6.28492	.89968
Most Extreme Differences	Absolute	.129	.201	.149
	Positive	.129	.201	.086
	Negative	-.125	-.145	-.149
Kolmogorov-Smirnov Z		.730	1.136	.840
Asymp. Sig. (2-tailed)		.661	.151	.480

a. Test distribution is Normal.

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, diketahui angka probabilitas atau *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang digunakan sebagai indikator uji normalitas. Berdasarkan hasil Sig data untuk Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 0,661 maka lebih besar dari 0,05 ($0,661 > 0,05$) sehingga data

¹⁵ Rina Novianty Ariawaty dan Siti Noni Evita, *Metode Kuantitatif Praktis....*, hal. 21

berdistribusi normal. Hasil Sig data untuk Penanaman Modal Asing adalah 0,151 maka lebih besar dari 0,05 ($0,151 > 0,05$) sehingga data berdistribusi normal. Hasil Sig data untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan adalah 0,480 maka lebih besar dari 0,05 ($0,480 > 0,05$) sehingga data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji Sig di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mendeteksi apakah variabel independen pada model regresi memiliki korelasi atau tidak. Kriteria model regresi yang baik adalah tidak boleh terdapat korelasi antara variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi gejala multikolinieritas adalah dengan melihat nilai *tolerance value* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan kriteria keputusan sebagai berikut :

1. Apabila *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.
2. Apabila *tolerance value* $< 0,10$ dan $VIF > 10$, maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model regresi.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.634	.000		
Penanaman Modal Dalam Negeri	.592	.558	.268	3.727
Penanaman Modal Asing	8.941	.000	.268	3.727

a. Dependent Variable: Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, menunjukkan bahwa pada tabel *Coefficients* pada kolom *Collinearity Statistics* terdapat nilai *tolerance* dan VIF. Pada kolom *tolerance* diperoleh nilai Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 0,268 dan Penanaman Modal Asing sebesar 0,268. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *tolerance* data yang diuji tersebut $> 0,10$, artinya tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji.

Sedangkan pada kolom VIF diperoleh nilai Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 3,727 dan Penanaman Modal Asing sebesar 3,727. Karena perolehan nilai VIF dari semua variabel kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa multikolinieritas tidak terjadi, sehingga data terbebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

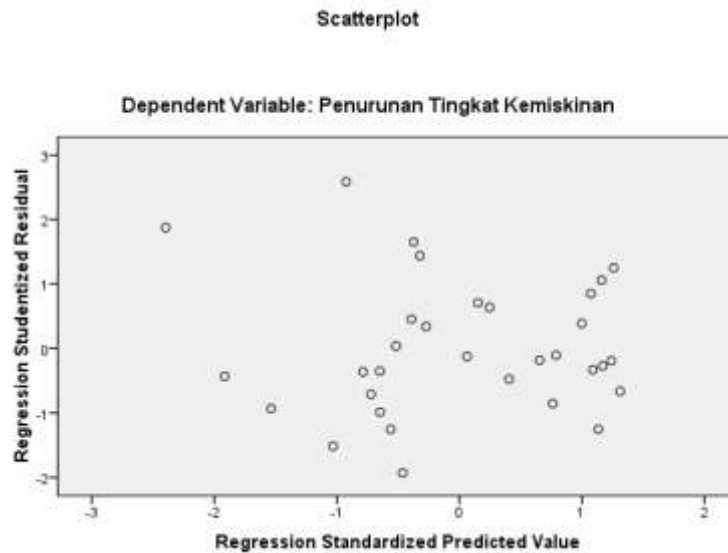
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.¹⁶ Suatu model regresi yang baik harus memiliki *variance* yang sama (homoskedastisitas) atau tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Uji statistik yang digunakan dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah menggunakan uji scatterplot dan uji glejser. Cara untuk mendeteksi ada atau tidak heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan grafik plot (dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka teridentifikasi terjadi heteroskedastisitas.

Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas apabila :

1. Titik-titik data melebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 28

Gambar 4.2
Hasil Uji Scatterplot



Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan gambar 4.2 dari pola scatterplot di atas menunjukkan hasil output SPSS gambar scatterplot didapatkan titik-titik menyebar di bawah di atas sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang teratur, sehingga dapat disimpulkan bahwa gambar di atas menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sementara itu, prinsip kerja pada uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser ini adalah dengan cara meregresikan variabel independent (variabel bebas) terhadap nilai absolut residual atau Abs_Res.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji glejser adalah dengan melihat nilai Sig pada setiap variabel. Apabila nilai Sig pada variabel lebih besar dari taraf signifikansi yaitu $> 0,05$, maka tidak terdapat

masalah heteroskedastisitas dalam model regresi dan apabila taraf signifikansi $< 0,05$ terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi. Berikut ini hasil uji glejser dari penelitian ini adalah :

Tabel 4.6
Hasil Uji Glejser

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.443	2.186		.202	.841
Penanaman Modal Dalam Negeri	.004	.020	.113	.201	.842
Penanaman Modal Asing	-.008	.024	-.188	-.334	.741

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, menunjukkan bahwa seluruh variabel independent (variabel bebas) terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai Sig pada Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 0,842 dan Penanaman Modal Asing sebesar 0,741. Dari perolehan nilai sig tersebut menunjukkan dari masing-masing variabel memiliki nilai yang lebih besar dari taraf signifikansi $> 0,05$.

d. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi korelasi antara residu pada periode saat ini (t) dengan residu pada

periode satu periode sebelumnya ($t - 1$). Model regresi yang baik adalah harus terbebas dari gejala autokorelasi. Masalah autokorelasi cenderung terjadi pada penelitian dengan menggunakan data *time series*.¹⁷ Berikut ini hasil uji autokorelasi dari penelitian ini adalah :

Tabel 4.7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.857 ^a	.735	.717	.47892	2.412

a. Predictors: (Constant), Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri

b. Dependent Variable: Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Petunjuk dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan melihat besarnya nilai Durbin Watson yaitu :

1. Apabila $d < dL$ atau $d > 4-dL$ artinya terdapat autokorelasi.
2. Apabila $dU < d < 4-dU$ artinya tidak terdapat autokorelasi.
3. Apabila $dL < d < dU$ atau $4-dU < d < 4-dL$ artinya tidak ada kesimpulan.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, menunjukkan bahwa pada tabel Model Summary pada kolom Durbin-Watson diperoleh nilai sebesar 2,412 dengan dU sebesar 1,573 dan $4-dU$ yaitu 2,427. Sehingga $1,573 < 2,412 < 2,427$ atau $dU < d < 4-dU$ terpenuhi. Hal ini berarti tidak

¹⁷ *Ibid.*, hal. 30

terdapat autokorelasi dan dengan kata lain penelitian ini layak untuk digunakan.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mencari pengaruh dua atau lebih variabel prediktor atau untuk mencari hubungan yang fungsional dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel kriteriumnya. Dengan kata lain, regresi linier berganda berguna untuk mengatasi masalah pada analisis regresi yang mengakibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. Berikut hasil uji regresi linier berganda dari penelitian ini adalah :

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	20.314	3.870		5.249	.000
	Penanaman Modal Dalam Negeri	.122	.036	1.026	3.386	.002
	Penanaman Modal Asing	.026	.043	.179	3.592	.048

a. Dependent Variable: Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 20,314 + (0,122 X_1) + (0,026 X_2)$$

Atau, Y (Penurunan Tingkat Kemiskinan) = $20,314 + 0,122$
(Penanaman Modal Dalam Negeri) + $0,026$ (Penanaman Modal Asing).

Berdasarkan pada persamaan hasil uji regresi linier berganda di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 20,314 menyatakan bahwa jika variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (X_1) dan Penanaman Modal Asing (X_2) masing-masing dalam keadaan tetap (konstan) maka Penurunan Tingkat Kemiskinan (Y) nilainya sebesar 20,314.
- b. Koefisien regresi X_1 (Penanaman Modal Dalam Negeri) sebesar 0,122 menyatakan bahwa setiap kenaikan (karena tanda positif) 1 satuan pada variabel Penanaman Modal Dalam Negeri, maka nilai Penurunan Tingkat Kemiskinan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika variabel Penanaman Modal Dalam Negeri mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka nilai Penurunan Tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar 1 satuan. Dalam hal ini, Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,122. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.
- c. Koefisien regresi X_2 (Penanaman Modal Asing) sebesar 0,026 menyatakan bahwa setiap kenaikan (karena tanda positif) 1 satuan pada variabel Penanaman Modal Asing, maka nilai Penurunan Tingkat Kemiskinan akan semakin meningkat. Sebaliknya, jika variabel Penanaman Modal Asing mengalami penurunan sebesar 1 satuan, maka

nilai Penurunan Tingkat kemiskinan juga akan mengalami penurunan sebesar 1 satuan. Dalam hal ini, Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 0,026. Dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- d. Tanda positif (+) menandakan arah hubungan yang searah. Sedangkan tanda negatif (-) menunjukkan arah berbanding terbalik antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah suatu hipotesis atau dugaan sementara pada suatu variabel X terhadap variabel Y memiliki pengaruh atau tidak.¹⁸ Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji signifikansi secara personal (uji t) dan uji signifikansi secara bersama-sama atau simultan (uji F). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

H₂ : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penanaman Modal Asing terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

H₃ : Terdapat pengaruh signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing secara simultan (bersama-sama) terhadap

¹⁸ *Ibid.*, hal. 34

indikator penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial adalah pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. digunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Adapun dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai Sig. < 0,05 atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.
2. Apabila nilai Sig. > 0,05 atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.9
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.314	3.870		5.249	.000
Penanaman Modal Dalam Negeri	.122	.036	1.026	3.386	.002
Penanaman Modal Asing	.026	.043	.179	3.592	.048

a. Dependent Variable: Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari Uji parsial (Uji t) menyatakan bahwa pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

a. Untuk hipotesis pertama (H_1) :

H_1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig untuk variabel Penanaman Modal Dalam Negeri adalah 0,002 atau dapat dikatakan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), artinya Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Sementara itu, nilai t tabel adalah 2,045, yang diperoleh dari nilai $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$, yang kemudian membagi 2 nilai $\alpha = 5\%$ ($0,05 / 2 = 0,025$), dimana angka tersebut lebih kecil dari nilai t hitung yaitu 3,386 ($3,386 > 2,045$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 yang berarti hipotesis berbunyi bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Jadi, hipotesis pertama (H_1) teruji.

b. Untuk hipotesis kedua (H_2) :

H_2 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig untuk variabel Penanaman Modal Asing adalah 0,048 atau dapat dikatakan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,048 < 0,05$), artinya Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Sementara itu, nilai t tabel adalah 2,045, yang diperoleh dari nilai $df = n - k - 1 = 32 - 2 - 1 = 29$, yang kemudian membagi 2 nilai $\alpha = 5\%$ ($0,05 / 2 = 0,025$), dimana angka tersebut lebih kecil dari nilai t hitung yaitu 3,592 ($3,592 > 2,045$). Sehingga dapat dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_1 yang berarti hipotesis berbunyi Penanaman Modal Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Jadi, hipotesis kedua (H_2) teruji.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) adalah pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah variabel independen (variabel bebas) secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (variabel terikat) secara signifikan.¹⁹ Adapun pada pengujian hipotesis simultan dalam

¹⁹ *Ibid.*, hal. 35

menggunakan SPSS dapat diperoleh melalui uji ANOVA. Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai Sig. $< 0,05$ atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y.
2. Apabila nilai Sig. $> 0,05$ atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4.10
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.441	2	9.220	40.200	.000 ^a
	Residual	6.651	29	.229		
	Total	25.092	31			

a. Predictors: (Constant), Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri

b. Dependent Variable: Penurunan Tingkat Kemiskinan

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari Uji simultan (Uji F) menyatakan bahwa pengujian hipotesisnya adalah sebagai berikut :

a. Untuk hipotesis ketiga (H_3) :

H_4 : Terdapat pengaruh signifikan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing secara simultan (bersama-sama) terhadap indikator Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019.

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai Sig untuk seluruh variabel independen adalah sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Sementara itu, nilai F tabel sebesar 3,316, yang diperoleh dari nilai $df = n - k = 32 - 2 = 30$ dengan $k = 2$ dan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai F hitung yaitu 40,200 ($40,200 > 3,316$). Berdasarkan hasil perhitungan dengan cara tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak atau dapat dikatakan secara bersama-sama atau simultan variabel Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2019. Jadi, hipotesis ketiga (H_3) teruji.

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah pengujian dalam suatu penelitian yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi (R^2) yang mendekati angka satu (1) artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi

variabel dependen, sebaliknya nilai R^2 mendekati 0 artinya kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.857 ^a	.835	.817	.47892

a. Predictors: (Constant), Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri

Sumber : data sekunder yang diolah dengan SPSS 16

Berdasarkan tabel 4.11 di atas, menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari uji koefisiensi determinasi (R^2) diketahui nilai *R Square* adalah 0,835. Nilai *R Square* berkisar antara 0 – 1. Menurut Nugroho dalam Sujianto menyatakan bahwa untuk regresi linier berganda sebaiknya menggunakan *R Square* yang sudah disesuaikan atau tertulis *Adjusted R Square*, hal ini dikarenakan dengan menyesuaikan jumlah variabel independen yang digunakan.

Nilai *Adjusted R Square* yang sesuai dengan jumlah variabel independen yang digunakan yaitu sebesar 0,817 atau 81,7%. Hal tersebut memberikan arti bahwa variabel dependen yaitu Penurunan Tingkat Kemiskinan dijelaskan oleh variabel independen yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing sebesar 81,7%, dan sisinya 18,3% (100% - 81,7%) dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.